

**PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENDANGKALAN SALURAN DRAINASE DI KELURAHAN BESAR**

**Gerry Gunawan Simanjuntak<sup>1</sup>, Artha Tobing<sup>2</sup>, Jhonson Pasaribu<sup>3</sup>, Jonson Rajagukguk<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas HKBP Nommensen Medan

Email Korespondensi: gerry.gunawan@student.uhn.ac.id

Email: artha.tobing@uhn.ac.id; jhonson.pasaribu@uhn.ac.id; jonson.rajagukguk@uhn.ac.id

**ABSTRACT**

This study aims to analyze the forms and level of community participation and the effectiveness of government efforts in addressing drainage sedimentation in Kelurahan Besar, Medan Labuhan District, Medan City. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through interviews and documentation. The results indicate that drainage sedimentation is caused by community behavior and natural factors such as sediment buildup. Government efforts include forming dredging teams, conducting regular community clean-up activities, and coordinating with related parties. Community participation is relatively good but inconsistent, increasing mainly when direct impacts such as flooding occur. It is concluded that the effectiveness of these efforts largely depends on public awareness and consistent participation. Therefore, enhanced environmental education and sustained collaboration between the government and the community are necessary.

**Keywords:** Community participation, Drainage, Sedimentation, Local government.

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat serta efektivitas upaya pemerintah dalam mengatasi pendangkalan saluran drainase di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendangkalan drainase disebabkan oleh perilaku masyarakat dan faktor alam seperti sedimentasi. Upaya pemerintah meliputi pembentukan tim pengorekan, gotong royong rutin, dan koordinasi lintas pihak. Partisipasi masyarakat tergolong cukup baik, namun belum konsisten dan cenderung meningkat saat terjadi dampak langsung seperti banjir. Disimpulkan bahwa efektivitas penanganan sangat bergantung pada kesadaran dan konsistensi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi lingkungan dan kerja sama berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat.

**Kata kunci:** Partisipasi masyarakat, Drainase, Pendangkalan, Pemerintah kelurahan.

**PENDAHULUAN**

Indonesia memiliki saluran air yang banyak dan kompleks. Jumlah pemukiman dan perkotaan yang semakin meluas membuat saluran pembuangan air atau selokan semakin dibutuhkan. Namun kebiasaan Masyarakat membuang sampah di selokan dianggap sebagai hal yang biasa, membuat kondisi selokan menjadi lebih parah. Fungsi utama selokan sebagai tempat menampung air pun hilang, bahkan menjadi penyebab utama banjir.

Drainase yang saat ini dibangun merupakan bentuk dari penerapan salah satu pilar pengelolaan SDA, yaitu pengendalian daya rusak air. Perencanaan drainase ini perlu dilaksanakan dengan baik karena bersinggungan langsung dengan kehidupan Masyarakat. Drainase merupakan system yang menyalurkan air hujan. System ini sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat, apalagi di daerah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk dan bangunan. Drainase juga menjadi salah satu fasilitas

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

223

Indexed



SINTA 4



dasar yang dirancang sebagai suatu system untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan komponen penting dalam perencanaan kota. Drainase di defenisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan. Drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah atau wilayah (Irwandri et al., 2023).

Seiring dengan pertumbuhan penduduk perkotaan yang amat pesat khususnya di Kota Medan, pada umumnya melampaui kemampuan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan diantaranya permasalahan drainase perkotaan. Akibatnya permasalahan banjir/genangan semakin meningkat pula. Pada umumnya penanganan system drainase di Kota Medan masih belum memadai, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dari tahap survey, investigasi perencanaan, pembebasan lahan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi Masyarakat. Peningkatan pemahaman mengenai system drainase kepada pihak yang terlibat baik pelaksana maupun Masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan, agar penanganan permasalahan system drainase dapat dilakukan secara terus menerus dengan sebaik-baiknya.

Adapun daerah Kelurahan Besar di pilih peneliti karena ingin mengevaluasi dimensi saluran drainase pada daerah tersebut. Lokasi yang sering mengalami masalah system pendangkalan saluran drainase adalah Jalan, dimana untuk daerah Kelurahan Besar berlokasi di Jalan Jala Raya. Permasalahan yang sering terjadi di daerah ini adalah genangan air pada saat curah hujan yang tinggi. Selain itu, sikap Sebagian Masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungan, misalnya kebiasaan membuang sampah kedalam saluran sehingga terjadi penyempitan dan pendangkalan pada saluran yang mengakibatkan air dalam saluran tidak dapat mengalir dengan lancar.

Oleh karena itu dalam kajian ini yang akan dibahas kondisi dari drainase yang terdapat di salah satu Kelurahan dalam Kecamatan Medan Labuhan yaitu di Kawasan Kelurahan Besar (Jalan. Jala Raya) Kawasan Kelurahan Besar merupakan Kawasan padat penduduk yang penduduknya tidak peduli akan lingkungan sekitar nya sehingga banyak sampah yang ada di saluran drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan atau banjir Ketika hujan turun. Diangkatnya permasalahan ini karena genangan/banjir yang terjadi dikawasan tersebut mungkin karena dipengaruhi kondisi kapasitas saluran drainase.

Beberapa dari titik genangan yang ada merupakan daerah dataran rendah sehingga sulit untuk mengalirkannya dengan konsep drainase sederhana, dengan Tingkat kesulitan yang tinggi biasanya menelan biaya yang relatif cukup besar, Masyarakat masih menganggap bahwa badan air merupakan tempat pembuangan sampah, sampah dibuang sembarangan di jalan, dan kemudian dibawa oleh air hujan masuk kesaluran, air menjadi kotor dan saluran menjadi penuh sampah sehingga tersumbat dan meluap pada musim hujan. Penyerobotan lahan umum mengakibatkan penampang sungai atau lubang berkurang, bukaan atau lubang di sisi jalan yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan limpasan air hujan yang berada di sepanjang jalan yang menuju ke saluran (street inlet) yang tidak terawat dengan baik sehingga menyulitkan air mengalir dari jalan menuju saluran yang ada.

Secara khusus penyebab terjadinya banjir/genangan periodik maupun genangan permanen pada system drainase Kota Medan adalah urangnya saluran induk yang melayani system drainase makro Kota Medan, sedangkan saluran induk yang ada sekarang ini beberapa diantaranya dalam kondisi yang terlalu dangkal sehingga sulit untuk menarik air dari daerah sekitarnya. Maka berdasarkan kondisi lingkungan Lokasi Kawasan Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Maka perlu dilakukan suatu studi kasus untuk menganalisis drainase pada daerah tersebut.

Maka perlu dilakukan kajian guna menganalisis system saluran drainase di Jalan. Jala Raya Kelurahan Besar, sehingga akan ditemukan Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah genangan air pada jalan ini. Tulisan ini akan menjawab bagaimana partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi pendangkalan saluran drainase di Kelurahan Besar.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan objek serta masalah pada penelitian sesuai dengan fakta yang dapat pada saat melakukan penelitian mengenai Persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi pendangkalan saluran drainase di Kelurahan Besar selain itu peneliti akan menggunakan tipe penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai persepsi dan upaya pemerintah dalam mengatasi saluran drainase secara objektif dengan menggunakan logika serta teori-teori sesuai dengan lapangan. Untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka peneliti ikut serta dalam peristiwa atau kondisi yang sedang di teliti.

## PEMBAHASAN

### Teori Partisipasi Masyarakat (Community Participation Theory)

Dalam kamus Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta menurut (Maulida. A, 2025) Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong pencapaian tujuan kelompok serta bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Menurut (Wahyuddin, 2018), partisipasi bisa dikatakan suatu kontribusi seseorang dalam suatu kegiatan untuk mendapatkan manfaat dari kontribusi tersebut.

#### Partisipasi Masyarakat

Menurut (Setiawan, 2014), partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi perubahan. Keith Davis menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam kelompok yang mendorong kontribusi serta tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan. Menurut (Rahmawati,2021), Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara umum dalam proses pembangunan. Dan (Nudianto, 2015), menyatakan bahwa partisipasi ditentukan oleh :

- 1) Adanya kesepakatan yang diberikan oleh masyarakat, untuk berpartisipasi.
- 2) Kemauan untuk mau berspartisipasi yaitu adanya kesepakatan yang disediakan atau di tumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, tidak akan berarti jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Kemauan untuk berpartisipasi yaitu ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya. Proses partisipasi menurut teori para ahli berbeda-beda, yang dimaksud dengan proses yaitu tahapan bagi masyarakat yang ikut terlibat didalamnya. Menurut (Adikampana, 2017), proses partisipasi ada beberapa tahap yaitu :

- 1) Partisipasi yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi yang terlibat dalam memperoleh manfaat.

Sedangkan menurut (Irene, 2015), partisipasi dapat dilihat dalam 4 tahap yaitu :

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 2) Partisipasi tahap pelaksanaan.
- 3) Partisipasi dalam memperoleh manfaat.
- 4) Partisipasi dalam evaluasi.

### Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Lingkungan.

Pengelolaan drainase di Kota Medan dalam konteks pencegahan bencana banjir dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan pendekatan manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan ini belum berjalan secara optimal di seluruh wilayah kota, khususnya di kawasan dengan curah hujan tinggi dan kepadatan bangunan yang meningkat signifikan dalam beberapa

#### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

225

Indexed



SINTA 4



tahun terakhir. Pada aspek perencanaan, Dinas PUPR menyusun rencana pembangunan dan perbaikan drainase melalui program tahunan yang mengacu pada data lapangan, pengaduan masyarakat, serta pengamatan teknis terhadap kondisi drainase eksisting. Namun, perencanaan ini belum berbasis data spasial menyeluruh, dan tidak dilengkapi sistem informasi drainase yang terintegrasi antarkecamatan. Rencana pengelolaan masih didominasi oleh pendekatan reaktif mengatasi genangan saat sudah terjadi banjir daripada pendekatan preventif yang mempertimbangkan analisis risiko dan prioritas mitigasi jangka panjang.

Selain itu, tidak semua wilayah di Kota Medan tercakup dalam rencana tahunan, karena keterbatasan anggaran menyebabkan penentuan lokasi dilakukan berdasarkan intensitas keluhan masyarakat, bukan kajian ilmiah terhadap aliran hidrologis dan kebutuhan daya tampung drainase. Dalam hal pengorganisasian, struktur kelembagaan pengelolaan drainase masih terkonsentrasi di Dinas PUPR dengan keterlibatan minim dari instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan BPBD. Koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal, sehingga pembagian tugas, pelimpahan kewenangan, dan alur komunikasi antar lembaga sering tidak sinkron. Sebagai contoh, saat terjadi sumbatan drainase akibat sampah rumah tangga, tidak ada mekanisme cepat antara Dinas PUPR dan Dinas Kebersihan untuk segera menangani, karena belum tersedia sistem koordinasi terpadu

Pengorganisasian pelaksana di lapangan juga minim dari sisi jumlah dan kapasitas teknis. Banyak tenaga teknis yang menangani drainase berasal dari honorer non-teknis, sehingga pekerjaan lapangan seperti pengerukan atau pembukaan saluran darurat sering tidak sesuai standar teknis yang diharapkan. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah kota secara rutin melakukan kegiatan fisik seperti pembangunan saluran baru, perbaikan saluran rusak, pengerukan endapan, dan pembukaan jalur air yang tersumbat. Namun pelaksanaan ini lebih difokuskan pada kawasan strategis seperti pusat kota dan jalan protokol, sedangkan kawasan padat penduduk di pinggiran kota sering kali tidak terjangkau program fisik tahunan. Selain itu, pelaksanaan teknis kerap terkendala oleh waktu pengerjaan yang tidak sesuai musim hujan, kurangnya alat berat, dan kondisi sosial seperti penolakan warga terhadap pembongkaran bangunan yang berdiri di atas saluran air. Tidak adanya standar teknis baku yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan juga menyebabkan kualitas infrastruktur yang dibangun menjadi tidak seragam dan rentan rusak kembali. Aspek pengawasan merupakan titik lemah dalam pengelolaan drainase di Kota Medan.

Pengawasan hanya dilakukan secara insidental ketika terjadi keluhan warga atau genangan air yang mencolok di permukaan jalan. Tidak ada sistem monitoring berkala terhadap saluran-saluran utama maupun sekunder yang berpotensi mengalami penyumbatan. Selain itu, belum tersedia sistem pelaporan berbasis digital yang memungkinkan masyarakat melaporkan kondisi saluran secara real-time kepada instansi terkait. Meskipun terdapat sistem pengaduan masyarakat berbasis aplikasi, penggunaannya belum massif dan tindak lanjutnya cenderung lambat. Hal ini membuat upaya perbaikan dan perawatan bersifat sporadis dan tidak terprogram secara sistematis. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan drainase di Kota Medan masih menghadapi tantangan besar, baik dari aspek struktural, sumber daya, maupun pola pikir birokrasi yang masih berorientasi proyek jangka pendek, bukan pengelolaan jangka panjang yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko. Padahal, untuk menghadapi ancaman banjir yang terus meningkat akibat perubahan iklim dan urbanisasi, diperlukan transformasi sistemik dalam manajemen drainase yang lebih adaptif dan partisipatif.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Drainase

Dalam pelaksanaan pengelolaan drainase di Kelurahan BESAR, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memberi kontribusi positif terhadap upaya pencegahan banjir. Pertama, adanya komitmen pemerintah daerah yang memasukkan pengendalian banjir sebagai salah satu program prioritas dalam rencana pembangunan daerah (RKPD). Komitmen ini tercermin dalam pengalokasian anggaran tahunan dan keberadaan unit teknis khusus di Dinas PUPR yang menangani drainase. Kedua,

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

226

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



partisipasi masyarakat, meskipun masih terbatas, mulai terlihat dalam bentuk gotong royong dan kegiatan bersih saluran di beberapa lingkungan yang terdampak banjir berulang. Ketiga, beberapa kecamatan telah mengembangkan inisiatif lokal seperti patroli drainase dan posko tanggap genangan yang dikelola bersama tokoh masyarakat dan petugas kelurahan. Namun demikian, berbagai hambatan strategis dan teknis masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan sistem drainase yang efektif.

Hambatan pertama adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, terutama dalam pengelolaan sampah. Banyak saluran drainase yang tersumbat oleh limbah rumah tangga dan material bangunan karena kurangnya edukasi dan sanksi. Hambatan kedua adalah ketidakterpaduan perencanaan sistem drainase antarwilayah, sehingga menyebabkan air darisatu kawasan melimpah ke kawasan lain yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan lintas kecamatan dengan pendekatan makro berbasis catchment area. Hambatan ketiga adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Alokasi anggaran pembangunan drainase sebagian besar terserap untuk kegiatan rutin, sehingga pembangunan saluran baru dan revitalisasi sistem lama harus antri berdasarkan urgensi dan tekanan masyarakat. Sementara itu, tenaga teknis di lapangan tidak memadai baik dari segi jumlah maupun kapasitas keahlian. Hambatan keempat adalah rendahnya penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan dan monitoring drainase. Belum adanya sistem informasi drainase dan peta digital saluran menyebabkan data yang digunakan dalam pengambilan keputusan cenderung manual dan tidak akurat.

## Upaya Mengatasi Hambatan

Menanggapi berbagai hambatan yang dihadapi, Pemerintah Kota Medan telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki pengelolaan drainase. Di bidang teknis, Dinas PUPR melakukan revitalisasi saluran drainase di titik-titik rawan banjir melalui pelebaran, pengerukan, dan pembangunan gorong-gorong. Pemerintah juga merancang program drainase terpadu yang menghubungkan saluran mikro (jalan lingkungan) dengan saluran makro (kawasan), meskipun implementasinya masih terbatas pada daerah prioritas.

Pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal untuk melakukan pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan pemanfaatan biopori sebagai sistem resapan alternatif. Hal ini dilakukan untuk melakukan pencegahan dimana Pencegahan juga merupakan pengambilan sebuah tindakan sebelum kejadian, berdasarkan pada data/keterangan yang berasal dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan.(Noor, 2013).

Dari sisi kelembagaan, telah dilakukan penyusunan SOP baru dalam pelaporan dan tindak lanjut pengaduan banjir serta peningkatan koordinasi antara Dinas PUPR dan BPBD dalam penanganan darurat saat curah hujan ekstrem. Namun, berbagai upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab akar permasalahan yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan lanjutan berupa rencana induk drainase kota (RIDK) yang berbasis data spasial, pembentukan unit respons cepat (Quick Response Unit) untuk mengatasi sumbatan drainase dalam waktu singkat, serta integrasi sistem pemantauan drainase berbasis teknologi (IoT dan GIS). Keberlanjutan pengelolaan drainase juga sangat tergantung pada konsistensi politik anggaran dan melibatkan masyarakat secara lebih bermakna, tidak hanya sebagai objek sosialisasi, tetapi sebagai mitra aktif dalam pemeliharaan infrastruktur lingkungan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendangkalan saluran drainase tidak dapat dilepaskan dari perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa informan mengakui bahwa masih terdapat kebiasaan membuang sampah ke dalam parit, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya, sisa sapuan rumah tangga yang terdiri dari debu dan tanah kerap kali langsung dimasukkan ke dalam saluran air. Meskipun tindakan tersebut terlihat kecil, namun apabila dilakukan terus-menerus oleh banyak orang, maka akan menghasilkan akumulasi sedimentasi yang cukup besar. Kondisi ini memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara tindakan individu dengan dampak kolektif terhadap lingkungan. Perilaku yang kurang peduli terhadap kebersihan saluran air secara tidak langsung mempercepat proses

pendangkalan. Dalam jangka panjang, kebiasaan tersebut tidak hanya merugikan lingkungan, tetapi juga berdampak pada kenyamanan dan keamanan masyarakat itu sendiri. Ketika saluran tersumbat dan hujan turun dengan intensitas tinggi, risiko genangan dan banjir menjadi lebih besar.

Selain faktor perilaku masyarakat setempat, penelitian ini juga menemukan adanya faktor eksternal berupa sampah kiriman dari wilayah lain. Air yang mengalir dari daerah yang lebih tinggi membawa material tambahan yang kemudian mengendap di wilayah Kelurahan Besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem drainase bersifat saling terhubung antarwilayah. Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di satu daerah dapat berdampak pada daerah lain. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendangkalan drainase memiliki dimensi sistemik. Artinya, solusi yang diterapkan tidak cukup hanya berfokus pada satu lingkungan saja, tetapi memerlukan koordinasi dan kerja sama lintas wilayah. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Tanpa adanya peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga kebersihan saluran air, upaya teknis yang dilakukan pemerintah akan sulit memberikan hasil yang bertahan lama.

### Upaya Pemerintah Bersifat Teknis dan Partisipatif

Dalam upaya mengatasi persoalan pendangkalan drainase, pemerintah Kelurahan Besar telah mengambil beberapa langkah yang dapat dikategorikan sebagai pendekatan teknis dan partisipatif. Pendekatan teknis terlihat dari pembentukan tim khusus yang bertugas melakukan pengerukan dan pembersihan saluran yang mengalami penyumbatan. Keberadaan tim ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menjaga fungsi infrastruktur lingkungan secara rutin. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan kegiatan gotong royong secara berkala yang melibatkan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan saluran drainase secara bersama-sama sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Program gotong royong menjadi sarana interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi bersama. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi warga. Apabila partisipasi tinggi, kegiatan berjalan dengan baik dan hasilnya lebih terasa. Sebaliknya, apabila partisipasi rendah, maka beban penanganan lebih banyak ditanggung oleh pemerintah. Hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan teknis saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Dengan demikian, upaya pemerintah dapat dikatakan sudah mengarah pada pola kolaboratif, meskipun masih memerlukan penguatan dalam hal konsistensi dan keberlanjutan. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, edukasi lingkungan, serta koordinasi yang lebih intensif dengan tokoh masyarakat setempat.

### Partisipasi Masyarakat Bersifat Aktif namun Situasional

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan drainase di Kelurahan Besar dapat dikatakan telah terbentuk, namun belum sepenuhnya konsisten. Seluruh informan yang diwawancarai menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan gotong royong atau pembersihan saluran air. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk berpartisipasi sudah ada di kalangan masyarakat. Motivasi partisipasi yang diungkapkan informan cukup beragam. Sebagian besar menyatakan bahwa mereka terlibat untuk mencegah terjadinya banjir atau genangan di sekitar rumah. Ada pula yang berpartisipasi karena merasa memiliki tanggung jawab bersama terhadap kebersihan lingkungan. Variasi motivasi ini menunjukkan bahwa partisipasi didorong oleh kombinasi antara kepentingan pribadi dan kesadaran sosial.

Namun demikian, partisipasi tersebut masih cenderung bersifat situasional. Artinya, keterlibatan warga meningkat ketika dampak genangan sudah dirasakan secara langsung. Dalam kondisi normal atau saat tidak terjadi banjir, tingkat partisipasi cenderung menurun. Selain itu, faktor kesibukan kerja juga menjadi kendala bagi sebagian warga untuk terlibat secara rutin. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum sepenuhnya menjadi budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menjadikannya lebih berkelanjutan, diperlukan upaya pembinaan yang mendorong perubahan

pola pikir dari reaktif menjadi preventif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya bergerak ketika masalah muncul, tetapi juga secara aktif menjaga lingkungan sebelum terjadi gangguan.

## **Efektivitas Pengelolaan Drainase Bergantung pada Sinergi Antara Pemerintah Dan Masyarakat**

Dari keseluruhan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan drainase di Kelurahan Besar sangat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Kedua unsur tersebut memiliki peran yang saling melengkapi. Pemerintah menyediakan kebijakan, fasilitas, serta tenaga teknis, sementara masyarakat berperan dalam menjaga kebersihan dan mendukung program yang telah dirancang. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan perannya secara optimal, maka hasil yang dicapai juga tidak maksimal. Upaya teknis yang dilakukan pemerintah akan bersifat sementara apabila masyarakat tidak menjaga kebersihan saluran setelah dilakukan pengerukan. Sebaliknya, partisipasi masyarakat akan sulit menghasilkan perubahan signifikan apabila tidak didukung oleh kebijakan dan fasilitas yang memadai dari pemerintah. Sinergi ini menunjukkan bahwa pengelolaan drainase merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja sama berkelanjutan. Pendekatan yang bersifat kolaboratif menjadi kunci dalam mengurangi risiko genangan dan menjaga fungsi saluran air dalam jangka panjang. Dengan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya kebersihan lingkungan, maka persoalan pendangkalan drainase dapat diminimalkan secara bertahap dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa persoalan pendangkalan saluran drainase di Kelurahan Besar merupakan permasalahan yang cukup nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kondisi drainase di beberapa wilayah, khususnya di kawasan yang memiliki kontur tanah lebih rendah seperti BTN Angkatan Laut dan Griya I Blok 8, tergolong rawan mengalami genangan ketika hujan deras. Meskipun pada beberapa kompleks ukuran drainase sebenarnya cukup memadai, yaitu memiliki kedalaman dan lebar yang relatif standar, namun fungsi saluran tersebut tidak lagi optimal karena adanya endapan lumpur, pasir, serta sampah yang menumpuk secara bertahap. Hal ini menyebabkan aliran air menjadi terhambat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk surut setelah hujan turun. Dari hasil wawancara juga dapat dipahami bahwa penyebab pendangkalan tidak hanya bersumber dari faktor alam seperti sedimentasi akibat arus air hujan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat itu sendiri. Kebiasaan membuang sisa sapuan ke parit, membuang sampah rumah tangga ke saluran air, serta kurangnya kepedulian terhadap kebersihan lingkungan menjadi faktor yang mempercepat terjadinya pendangkalan. Bahkan tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara terus-menerus, tanpa disadari, pada akhirnya memberikan dampak besar terhadap kondisi drainase. Selain itu, adanya sampah kiriman dari wilayah lain juga turut memperparah situasi di beberapa titik aliran yang menjadi muara air.

## **REFERENSI**

- Creswell, J. W. (2015). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Simon, H. A. (1997). *Administrative behavior: A study of decision-making processes in administrative organizations* (4th ed.). Free Press.
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu publik*. Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan publik*. AIPI Bandung
- Jurnal
- Ardiansyah, A. (2021). *Analisis partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan Drainase di Kota*

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

229

Indexed



SINTA 4



# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 4 April 2026

- Makale. Planomadani: Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 10(2), 123–130.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. Cornell University.
- Hidayat, R., & Sari, D. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan drainase jalan di Desa Catur Karya. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*, 2(1), 45–52.
- Irwandri, Apra Santosa, T., & Losita, D. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Drainase untuk Mengatasi Banjir. *Journal of Human And Education*, 3(4), 349–352.
- Maulida, A, R. T. (2025). ISSN : 2723-0937 DOI. 10.35722/japb  
<https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB>. 8, 378–390.
- Pratama, Y., & Nugroho, A. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektivitas pembangunan drainase program KOTAKU. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(1), 67–75.
- Sondakh, J., Ruru, J., & Londa, V. (2020). Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(95), 1–10.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

230

